

Gereja Katolik dan Dialog Antaragama di Indonesia Sejak Konsili Vatikan II: Mendalami tema-tema krusial relasi antariman

oleh **Blasius B. Baene**¹ – Melak, Kalimantan Timur

Abstract:

Inter-faith dialogue in Indonesian context is actually one of the crucial issues for the Church. This new paradigm of doing mission in today's world has been promoted since the Second Vatican Council (1962-1965) onwards for the betterment of living together in this shared-world and for the goodness of humanity. The Catholic Church of Indonesia is called to make inter-faith dialogue as the main tone and method of her mission and in so-doing collaborates with people of other faiths for a just and peaceful society. The Church of Indonesia works this missional character out of many ecclesial documents, from the Second Vatican Council throughout the Pontificate of Paul VI and John Paul II. The writer tries to offer his analysis with the main intention to support the missional dialogue that the Church has made within the Indonesian multicultural society.

Keywords: paradigma dialog antaragama, Hierarki Gereja Katolik Indonesia, perdamaian dan keadilan, misi dialogal Gereja

1. Pengantar

Pada perayaan 25 tahun Hierarki Gereja Katolik Indonesia (1986), dalam suratnya kepada para Uskup Indonesia Paus Yohanes Paulus II mengatakan antara lain demikian:

Negeri kalian meliputi banyak kebudayaan beranekaragam dan merupakan tempat penampungan pelbagai tradisi keagamaan. Toleransi dan kebebasan beragama merupakan salah satu asa fundamental yang di atasnya bangunan politik dan sosial dibangun. Gereja berusaha menyumbang bagi penguatan semangat keharmonisan semacam itu dengan mengembangkan dialog pengertian yang tulus dan bersahabat serta kerjasama dengan semua tradisi keagamaan yang lain, khususnya dengan saudara dan saudari Muslim dan Budha (Beding, 1986).

1 Penulis adalah alumnus (S1 dan S2) di STFT Widya Sasana, Malang, dan Seminari Tinggi SVD Surya Wacana, Malang; sekarang mengamalkan ilmu dan imannya di Paroki St Markus, Melak, Kalimantan Timur.

Melalui cuplikan surat ini kita melihat bagaimana Sri Paus memberikan apresiasinya kepada Gereja Katolik Indonesia sehubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan karya misi selama ini, utamanya setelah pendirian Hierarki Gereja Katolik Indonesia oleh Tahta Suci pada tahun 1961. Pendirian ini tentu saja merupakan suatu peristiwa yang penuh makna dan bersejarah dalam Gereja, karena ia merupakan pengakuan resmi bahwa Gereja lokal di tanah air memiliki kedudukan penuh dalam lingkungan Gereja universal.

Seperti kita ketahui, dengan mengeluarkan Dekrit “*Quod Christus Adorandus*” (3 Januari 1961), Paus Yohanes XXIII mendirikan Hierarki Gereja Katolik Indonesia. Lalu, pada tanggal 20 Maret 1961, Sri Paus mengirim surat resmi kepada para Uskup Indonesia dengan judul “*Sacrum Expeditionum*”. Dalam surat tersebut Sri Paus menekankan antara lain, betapa penting peristiwa historis ini, yang patut ditulis dengan huruf-huruf emas dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Peristiwa ini juga mengingatkan Gereja akan seorang tokoh penting dan perintis karya misi di Indonesia, yaitu St. Fransiskus Xaverius yang pernah berkarya sebagai misionaris di Maluku.

Sudah lima puluh tahun lebih usia Hierarki Gereja Katolik Indonesia sejak pendiriannya itu. Dalam arti tertentu, sudah cukup matang, baik secara internal dalam lingkungan Gereja maupun secara eksternal dalam masyarakat luas. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini menantang untuk dicari jawabannya: “Sejauh mana Gereja Katolik Indonesia telah menunjukkan identitasnya sebagai institusi yang ambil bagian penuh dalam menangani persoalan-persoalan sosial bangsanya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu agama? Kenapa dialog-dialog antaragama, di mana Gereja Katolik berpartisipasi aktif, tidak berdampak banyak bagi kehidupan masyarakat luas, karena ternyata rangkaian kekerasan atas nama agama masih juga merupakan isu yang sangat krusial di negeri ini?”

Kita yakin bahwa aneka kekerasan atas nama agama itu menunjukkan ketiadaan nurani manusia untuk sungguh-sungguh berdialog dan bersama-sama membangun masyarakat Indonesia yang damai dan aman bagi setiap warganya.² Yang jelas, tata *societas* hidup manusia terkoyak oleh tindakan kekejaman yang tidak menghormati nilai tata hidup bersama. Lebih dari itu, kekerasan

2 Beberapa tragedi kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, misalnya, di penghujung abad lalu dan dasawarsa pertama abad ini: tragedi Situbondo, Maluku, Poso, Ambon, Mataram; begitu pula peristiwa penganiayaan terhadap jemaat HKBP di Bekasi Jawa Barat (12 September 2010), peristiwa Cikeusik yang menewaskan 6 orang Jemaah Ahmadiyah (6 Februari 2011), perusakan terhadap Gereja Katolik dan Gereja Pentakosta di Indonesia serta sekolah Kristen Graha Sekinah di Temanggung (8 Februari 2011).

atas nama agama bukan hanya membuat orang semakin tertutup dan penuh curiga, melainkan juga bahwa tindakan itu sendiri merupakan pelecehan terang-terangan terhadap agama yang bersangkutan.

Melihat kenyataan ini, pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana peran Gereja Katolik dalam membangun dialog antaragama di Indonesia? Masih mungkinkah dialog menjadi ruang atau media yang dapat meredakan berbagai konflik, ketegangan dan aneka kekerasan atas nama agama? Fenomena kekerasan atas nama agama ini mendorong kami untuk mendalami lagi pemikiran tentang bagaimana peran Gereja Katolik Indonesia dalam membangun dialog antaragama yang bermakna. Tulisan ini membatasi bahasannya sampai dengan era Paus Yohanes Paulus II, yang telah digelarkan kudus itu oleh Paus Friskus pada 27 April 2014.

2. Gereja Katolik tentang Dialog Antaragama

Menggagas keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam membangun dialog antaragama, tentunya tidak lepas dari semangat *aggriornamento* Paus Yohanes XXIII dalam Konsili Vatikan II, yang membuka pintu-pintu Gereja Katolik bagi dunia. Kita mencatat bahwa sesudah Konsili Vatikan II, gagasan tentang dialog antaragama terasa semakin kuat, terutama lewat pemikiran Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Berikut ini akan diuraikan secara singkat gagasan-gagasan Konsili Vatikan II, Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II tentang dialog antaragama.

2.1. Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II merupakan cikal bakal lahirnya dialog antaragama. Dialog antaragama yang digagas oleh Konsili Vatikan II berangkat dari sejarah kelam yang dialami oleh Gereja Katolik lewat pernyataan "*extra ecclesiam nulla salus*" – di luar Gereja tidak ada keselamatan (Armada Riyanto, 1995:25-26).³ Pernyataan ini membawa pengaruh negatif yang berkepanjangan dalam Gereja Katolik, utamanya dalam relasi dengan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain.

3 Ungkapan *extra ecclesiam nulla salus* dapat ditemukan dalam tulisan para Bapa Gereja, utamanya St. Cyprianus pada abad ke-3 yang nadanya bersifat apologetis. Pandangan ini kemudian menjadi sangat populer dan lebih keras sejak disebarluaskan oleh Fulgentius (567-533). Ungkapan ini (*extra ecclesiam nulla salus*) dipakai pertama kalinya pada Konsili Florence (1442) dan ditujukan kepada orang-orang kafir (sesat).

Melihat kenyataan ini, Konsili Vatikan II membuka wacana baru tentang “dialog” sebagai ruang untuk membangun relasi baru antara Gereja dengan para penganut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain. Seruan misioner Konsili untuk berdialog dengan para pengikut iman lain tercetus, misalnya, dalam *Nostra Aetate*, yakni

Gereja mendorong para putranya supaya bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberikan kesaksian tentang iman serta perihidup Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka (*NA*, 2).

Usaha Konsili untuk membuka ruang dialog dengan agama-agama lain melahirkan dua poin penting, pertama, Konsili Vatikan II mengubah paradigma “*extra ecclesiam nulla salus*” dengan mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus juga mungkin bagi agama-agama lain (Kirchberger, 2002:72). Kedua, Konsili mengakui bahwa dalam agama-agama lain juga terdapat unsur-unsur kebenaran dan kebaikan (*OT*, 6), unsur-unsur religius dan manusiawi (*GS*, 92), benih-benih kontemplasi (*AG*, 18), kebenaran dan rahmat (*AG*, 9), benih-benih sabda (*AG*, 11, 25), kebenaran yang menerangi semua orang (*NA*, 2), (Kirchberger, 2002:74; Armada Riyanto, 1995:54); karena itu, Gereja tidak menolak apa yang dianggap benar dan suci dalam agama-agama tersebut (Rausch, 2001:361). Dengan penegasan ini, Konsili membuka pintu selebar-lebarnya bagi perkembangan dialog antaragama sebagai upaya untuk membangun pemahaman tentang agama-agama lain. Oleh karena itu, Gereja Katolik tidak mengambil sikap “oposisi” dengan agama-agama lain, melainkan menjalin “persahabatan yang relasional dan bekerjasama dengan mereka yang berkehendak baik walaupun tidak mengimani Allah” (Armada Riyanto, 1995:30).

2.2. Paus Paulus VI

Usaha Paus Paulus VI untuk membangun dialog antaragama tampak dalam ensiklik yakni *Ecclesiam Suam* (1964) dan anjuran apostolik *Evangelii Nuntiandi* (1975). Dalam *Ecclesiam Suam*, Paus Paulus VI pertama-tama melukiskan sejarah keselamatan sebagai “dialog” yang tidak pernah berhenti antara Allah dan manusia (Knitter, 2005:261). Dialog merupakan jembatan untuk memperbaiki relasi Allah dan manusia yang telah rusak akibat keegoisan manusia. Dengan sikap “dialogis” ini manusia menemukan kembali identitasnya.

Demikian pula halnya dengan agama-agama yang berbeda, mereka akan menemukan identitasnya jika mereka bersedia membangun dialog satu sama

lain. Sebaliknya, jika masing-masing agama itu dan para penganutnya tetap eksklusif, maka mereka tidak pernah saling mengenal dan saling memahami. Masing-masing hanya akan sibuk dengan agamanya sendiri. Akibatnya, sikap fanatisme dan absolutisme kebenaran agama tidak dapat dihindarkan.

Fanatisme itu merupakan sikap atau keyakinan yang kuat terhadap agama, politik, dan lain sebagainya. Sikap ini terbukti telah memicu persoalan jika diterapkan dalam hidup beragama, karena sikap seperti ini hanya berorientasi pada agama sendiri sebagai kebenaran satu-satunya. Sedangkan absolutisme mengatakan bahwa kebenaran satu-satunya hanya terdapat pada agama. Di sini, Paus Paulus VI mengajak Gereja untuk menjalin “dialog” dengan siapa pun yang berkehendak baik. Sebab, prinsip dialog adalah membangun perdamaian. Dialog yang terjalin antaragama akan melahirkan kondisi yang menguntungkan dan menumbuhkan perdamaian. Dialog menyingkirkan kepura-puraan, persaingan, tipu daya, penghianatan dan sekaligus mencegah pertikaian (Armada Riyanto, 1995:37).

Sikap dialogis Paus Paulus VI menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai dialog. Dialog bukan hanya sekedar wacana komunikasi dengan orang lain. Tujuan dialog lebih kepada “pengenalan” untuk memahami perbedaan. Sikap dialogis Paus Paulus VI semakin ditegaskan dalam anjuran apostolik *Evangelii Nuntiandi*. Surat ini merupakan hasil refleksi Paus Paulus VI atas hasil sinode para Uskup sedunia pada tahun 1974. Dalam anjuran apostoliknya ini, Paus mengatakan bahwa Gereja menghormati nilai-nilai moral dan spiritual yang tidak terdapat dalam agama-agama lain dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung bersama mereka memajukan dan membela cita-cita bersama kebebasan beragama, persaudaraan, kebudayaan yang baik, kesejahteraan sosial dan tatanan sipil (Kirchberger, 2002:77).

Gagasan Paus Paulus VI dalam *Evangelii Nuntiandi* mengantar kita kepada sebuah pemahaman bahwa di tengah keragaman agama itu, dialog menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghadirkan relasi yang korelasional satu sama lain. Hanya melalui dialog manusia bisa saling mengerti dan memahami perbedaan yang ada. Gagasan yang senada juga diungkapkan oleh Harold Coward demikian:

[...] melalui dialog, pengalaman-pengalaman partikular mengenai kebenaran, yaitu Kristus bagi orang Kristen, Veda bagi orang Hindu, Muhammad bagi orang Islam, dan lain sebagainya dapat diperluas dan diperdalam sehingga menyingkap pengalaman-pengalaman baru mengenai kebenaran. Melalui dialog, hubungan antar agama bukan lagi hubungan yang bersifat asimilasi atau hubungan substitusi, melainkan hubungan yang saling menyuburkan (1989:79).

2.3. Paus Yohanes Paulus II

Pengguliran dialog antaragama dilanjutkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Bahkan, Sri Paus menyebut dirinya sebagai pembawa pesan perdamaian antaragama (Krispurwana Cahyadi, 2007: 321). Patut diakui bahwa selama hidupnya, Paus Yohanes Paulus II dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka yang memberi perhatian pada dialog antaragama, perdamaian dan lain sebagainya. *Redemptoris Missio* merupakan ensiklik Paus Yohanes Paulus II yang memperlihatkan gagasan-gagasan tentang dialog antaragama sebagai misi Gereja. Dalam ensiklik ini, Yohanes Paulus II mengedepankan dimensi ganda misi Gereja dalam dialog antaragama, baik dimensi *ad intra* maupun *ad extra*. Dengan dimensi *ad intra*, *Redemptoris Missio* menyebutkan upaya pembaruan yang berasal dari dalam. Artinya, pembaruan iman dan kehidupan iman Kristen yang tidak lain menunjuk kepada pembaruan semangat misioner (*RM*, 2). Sebaliknya, dengan dimensi *ad extra*, *Redemptoris Missio* menghadirkan diri Gereja kepada orang-orang bukan Kristen, terutama para penguasa negara yang menjadi tujuan karya misioner (*RM*, 3; Armada Riyanto, 1995:71-75; Kirchberger, 2002:80-84).

Selama masa kepausannya, Paus Yohanes Paulus II tidak henti-hentinya mengajak umat beriman untuk membangun dialog antaragama. Menurut Sri Paus, umat beriman merupakan pembawa pesan perdamaian dan pemberi kesaksian akan solidaritas universal, yang mengatasi kepentingan pribadi maupun kelompok, agar tidak seorang pun dilupakan dan disingkirkan (Krispurwana Cahyadi, 2007:322). Lebih lanjut, perdamaian memiliki dimensi spiritual karena perdamaian merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu, upaya manusia untuk membangun perdamaian harus didasarkan pada sikap kerendahan hati manusia, terutama dalam doa dan dalam mendengarkan kehendak Allah (*Ibid.*). Dalam upaya menegakkan dialog antaragama, Bapa Suci menekankan peran manusia sebagai pelaku utama dialog dengan disertai kerendahan hati dan kesiapsediaan untuk berdialog dengan orang lain.

Gagasan-gagasan Yohanes Paulus II dalam *Redemptoris Missio* mengantar kita kepada pemahaman tentang dialog antaragama. Dialog adalah tugas evangelisasi Gereja. Jika dialog dipahami sebagai metode dan sarana untuk memperkaya dan saling mengenal, maka dialog tidak pernah bertentangan dengan misi *ad gentes* Gereja (*RM*, 55). Oleh karena itu, dialog tidak berasal dari kepentingan diri, melainkan suatu kegiatan yang mengenal prinsip-prinsip, syarat-syarat dan martabatnya sendiri. Melalui dialog, Gereja berusaha menemukan benih-benih sabda, sinar yang menerangi semua orang. Maka, setiap orang yang terlibat dalam dialog harus konsisten dengan tradisi keagamaan dan keyakinan mereka sekaligus terbuka untuk memahami mereka

dari pihak lain tanpa pretensi atau pikiran yang picik, tetapi dengan kebenaran dan kerendahan hati (*RM*, 56). Akhirnya, dialog mencakup seluruh aspek hidup manusia. Artinya, melalui dialog, umat beriman memberikan kesaksian bagi semua orang tentang pengalaman hidup sehari-hari dan saling membantu agar hidup sesuai dengan nilai-nilai guna membangun masyarakat yang lebih adil dan bersaudara (*RM*, 57).

3. Paradigma dalam Dialog Antaragama

3.1. Eksklusivisme

Eksklusivisme merupakan paham yang cenderung memisahkan diri dari masyarakat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003:289); karena orang yang eksklusif menjauhkan diri dari, mengasingkan diri dari, mencegah masuknya, mengecualikan, mengucilkan, menutup pintu bagi (Armada Riyanto, 2000a:16). Singkatnya, eksklusivisme adalah paham yang menutup diri dari yang lain dan memandang diri sendiri sebagai satu-satunya yang benar.

Paradigma eksklusivisme dalam setiap agama menjadi salah satu sebab runtuhnya relasi antaragama, karena dalam pandangan eksklusivisme muncul suatu klaim bahwa hanya agamanya yang paling benar. Pandangan ini membekukan lahirnya dialog antaragama untuk memahami dan menghargai nilai-nilai kebenaran dalam agama-agama lain. Akibatnya, muncul sikap intoleransi, kesombongan dan penghinaan terhadap agama-agama lain (Panikkar, 1994:19). Menurut Paus Yohanes Paulus II, sikap “intoleransi” merupakan suatu hambatan yang serius bagi terciptanya perdamaian, teristimewa intoleransi antarumat beragama yang cenderung melahirkan penindasan kepada kaum minoritas.

3.2. Inklusivisme

Paradigma inklusivisme memiliki nada yang lebih “lunak” daripada eksklusivisme yang bersikap ekstrim terhadap agama-agama lain. Jika dalam eksklusivisme dominasi tentang kebenaran agama yang dianut sangat mencolok, sebaliknya dalam paradigma inklusivisme ada suatu pengakuan bahwa disamping kebenaran yang ada dalam kelompoknya, unsur-unsur kebenaran juga ditemukan dalam kelompok agama-agama yang lain (Sudhiarsa, 2008:77).

Pemahaman di atas, tampaknya menghadirkan sebuah pemahaman universal dengan mengakui kebenaran dalam agama-agama lain. Tetapi di balik sikap yang demikian, paham inklusivisme hanyalah sebuah “wacana” pengakuan

adanya kebenaran dalam agama-agama lain, karena paham ini sesungguhnya lebih mengedepankan kebenaran di dalam agamanya sendiri. Pengakuan akan adanya kebenaran dalam agama-agama lain bukanlah pengakuan yang “lengkap” atau “penuh”, tetapi pengakuan parsial. Menurut Raimundo Panikkar, paham inklusivistik mengandung konsekuensi, yaitu melahirkan sikap kesombongan, karena kelompok itu sendiri yang memiliki sikap toleransi menurut pandangan mereka, sedangkan yang lain tidak (Panikkar, 1994:21). Paradigma semacam ini ditemukan dalam agama Kristen dengan istilah “inklusivisme-kristosentris,” artinya paradigma inklusif yang berpusat pada Kristus. Kristus dinyatakan sebagai pusat keselamatan yang didambakan oleh agama-agama (Marianta, 2003:31).

3.3. Pluralisme

Pluralisme merupakan suatu paham yang mengakui bahwa semua kelompok agama memiliki ajaran dan praktek religius yang valid. Oleh karena itu, pluralisme menekankan “kesetaraan hak” semua agama untuk mengungkapkan diri sebagai jalan keselamatan atau pemilik kebenaran. Gagasan tentang “kesetaraan hak”, demikian Yohanes Wayan Marianta (2003:32) menulis, dicetuskan oleh Paul F. Knitter. Yang dimaksud dengan kesetaraan hak dalam agama-agama adalah bukan perealisasi bahwa semua agama memiliki kebenaran yang sama dan baik, melainkan kesetaraan hak dalam level dialog (*Ibid.*). Artinya, agama-agama yang berbeda dimungkinkan untuk merealisasikan diri melahirkan dialog agar mencapai pemahaman yang mendalam tentang agama-agama lain. Dengan cara seperti ini, maka mustahil setiap agama berada dalam posisi ketidaktahuan antara satu dengan yang lain.

4. Wajah Gereja Katolik Indonesia dalam Dialog Antaragama

4.1. Konteks Masyarakat Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman baik secara kultural, sosiologis, geografis maupun agama. Berbicara tentang dialog antaragama di Indonesia, mau tidak mau kita harus masuk dalam konteks masyarakat Indonesia yang beranekaragam. Keanekaragaman masyarakat Indonesia mendorong kita untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ini. Salah satu media untuk memahami perbedaan yang ada dalam masyarakat plural seperti Indonesia adalah melalui dialog. Artinya, masyarakat yang beranekaragam dimungkinkan untuk membangun pemahaman-

pemahaman baru tentang aneka perbedaan agama melalui dialog bersama. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perbedaan keyakinan agama kerap kali menjadi pemicu lahirnya konflik antaragama di Indonesia (bdk. Mul Khan, 2007:147-155).

4.2. Peran Gereja Katolik Indonesia

Sesudah Konsili, Gereja Katolik Indonesia terus berusaha untuk menerapkan dialog antaragama. Seperti dikatakan di atas, Konsili Vatikan II memang merupakan cikal bakal keterlibatan umat Katolik untuk membangun dialog antaragama. Terlebih lagi, usaha Gereja Katolik Indonesia dalam membangun dialog dengan agama-agama lain terasa semakin kuat seiring dengan terbentuknya Hierarki Gereja Katolik Indonesia.

Usaha Gereja untuk menjalin dialog dengan agama-agama lain sesudah Konsili Vatikan II tidak dapat diragukan lagi (lih. Armada Riyanto, 2010: 373-480). Bahkan, hingga sekarang ini, Gereja Katolik Indonesia terus berusaha untuk menggalakkan dialog sebagai perwujudan panggilan misionernya. Namun, harus diakui bahwa keterlibatan Gereja dalam dialog antaragama tidaklah serta merta sekali jadi, melainkan harus melewati tahap atau proses yang terus menerus. Pada dasawarsa 1970-an, misalnya, Gereja Katolik Indonesia mulai membangun dialog dengan agama-agama Kristen yang lain dan agama-agama bukan Kristen. Kendatipun usaha ini lebih diarahkan pada pembangunan ekumenisme, namun gagasan tentang dialog dengan agama-agama bukan Kristen tidak diabaikan (*Ibid.*, 384). Usaha Gereja Katolik Indonesia untuk berdialog dengan agama-agama lain, mendorong Gereja untuk mengkonkritkan panggilan misionernya, yakni dengan mendirikan PWI (1966) sebagai wadah bagi Gereja Katolik Indonesia dalam membangun dialog antaragama (*Ibid.*, 385).

Keterlibatan Gereja dalam membangun dialog antaragama tampak semakin kuat lewat kebijakan-kebijakan pastoral yang dikeluarkan oleh Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) pada tahun 1970 (*Ibid.*, 385-390). Selain mengeluarkan kebijakan pastoral, pada tahun 1985, MAWI semakin mengkonkritkan langkahnya untuk berdialog dengan agama-agama lain lewat penerbitan buku pedoman hubungan Gereja dan negara bagi umat Katolik, yakni *Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila*. Kemudian, pada tahun 1992 hingga sekarang Gereja Katolik Indonesia terus menggalakkan dialog antaragama (*Ibid.*, 390-398).

Dewasa ini, Gereja Katolik Indonesia semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan sosial yang tidak hanya terbatas pada persoalan

agama tetapi juga persoalan sosial lainnya.⁴ Artinya, para pemimpin Gereja tidak hanya menyerukan dialog antaragama, tetapi juga dialog dalam konteks keseluruhan persoalan hidup bangsa, yakni ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kebijakan untuk membangun dialog dalam berbagai konstelasi hidup manusia merupakan suatu cetusan bahwa Gereja Katolik Indonesia hidup dan hadir di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah dia menjadi bagian dan menerima dampak dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia (Krispurwana Cahyadi, 2010:228).

Suara Gereja terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia tampak dalam berbagai pernyataan KWI. *Pertama*, pernyataan KWI dalam SAGKI tahun 2000. Dalam SAGKI tahun 2000, KWI menyerukan agar konflik-konflik berdarah yang terjadi di mana-mana segera diakhiri (*Spektrum* 1/XXIX [2001]: 21). Pernyataan KWI ini merupakan implementasi keterlibatan Gereja Katolik Indonesia untuk membangun dialog dengan berbagai elemen termasuk elemen agama sekaligus melihat bahwa dialog merupakan satu-satunya jembatan untuk mengakhiri berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Kedua, gagasan KWI dalam SAGKI tahun 2000 ditegaskan kembali dalam Nota-Nota Pastoralnya – “Keadilan Sosial bagi Semua” (2003), “Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa” (2004), dan “Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan” (2006). Dari ketiga Nota Pastoral ini, KWI mengangkat aspek-aspek mendasar dalam kehidupan manusia, yakni persoalan ekonomi, agama, hukum, budaya, pendidikan, lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia merupakan cetusan dari keburaman dunia politik bangsa Indonesia. Yang paling mencolok menurut KWI adalah hilangnya citarasa dan perilaku politik yang baik dan benar. Berangkat dari kenyataan ini, KWI menyerukan agar “keadilan sosial bagi semua” umat manusia ditegakkan (Nota Pastoral 2003).

Apa yang dicetuskan dalam Nota Pastoral 2003 semakin dipertajam dalam Nota Pastoral tahun 2004 dengan tema “Keadaban Publik menuju Habitus

4 Beberapa catatan yang memberikan informasi kepada kita bagaimana keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam berbagai persoalan sosial di Indonesia, antara lain: *Membangun persaudaraan di tengah keprihatinan*, pesan dari sidang KWI 1997 untuk umat Katolik, dalam *Spektrum* 4/XXVI (1998): 55-58; beberapa pernyataan KWI terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia, seperti peristiwa Trisakti, tanggapan KWI terhadap peristiwa di Jl. Ketapang Jakarta pada tanggal 22 November 1998, peristiwa Kupang, dan peristiwa Ambon, dalam *Spektrum* 1/XXVII (1999): 19-34; Pernyataan KWI dalam SAGKI 2000, *Akhirilah Konflik-konflik Berdarah*, dalam *Spektrum* 1/XXIX (2001): 21-27 dan dalam Nota Pastoral 2003, 2004 dan 2006.

Baru Bangsa". Melalui tema ini, KWI melihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan jati dirinya dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga hidup manusia tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan cita-cita mulia kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kendatipun Gereja merupakan kaum minoritas, namun dia tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Justru dalam aneka persoalan itu, Gereja menunjukkan eksistensi panggilan misionernya sebagai institusi yang berpihak pada kehidupan manusia (Binawan, 2007:64-76). Dalam konteks ini, Gereja berupaya untuk membangun dialog yang tidak hanya terbatas pada dialog agama, melainkan juga dialog dalam konteks keseluruhan persoalan hidup manusia (Armada Riyanto, 2007:11-42).

4.3. Tantangan Dialog Antaragama dalam Misi Gereja

Membangun dialog antaragama di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis secara sosial, ekonomi, pendidikan, geografis, budaya maupun agama. Namun, kenyataan ini tidak boleh membuat orang pesimis bahwa dialog tidak bisa dibangun dalam konteks masyarakat pluralis, kendatipun hal itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Justru dalam pluralitas inilah dialog antaragama menjadi sebuah ruang yang sangat fundamental. Artinya, dialog menjadi ruang untuk memahami agama-agama lain. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan dalam membangun dialog antaragama adalah apakah dalam pluralitas itu masyarakat Indonesia yang terbentuk dalam kelompok-kelompok agama bersedia membuka diri untuk berdialog dengan agama-agama lain guna membangun tata hidup bersama yang harmonis? Apakah para pemimpin agama, terutama kelompok-kelompok yang beraliran garis keras atau fundamentalis, bersedia membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok agama-agama lain? Jika kelompok-kelompok agama masih tetap menutup diri terhadap dialog, maka niscaya konflik dan kekerasan atas nama agama di Indonesia tidak akan pernah berhenti.

Memang pluralisme agama di Indonesia tidak bisa ditiadakan. Tetapi, terminologi pluralisme harus dipahami sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Artinya, pluralisme jangan dijadikan sebagai tempat untuk memutlakan kebenaran agama tertentu. Inilah yang diungkapkan oleh Prof. H.A. Mukti Ali, sebagaimana disitir oleh Prof. Malik Fadjar (2001:46) bahwa pluralisme tidaklah mengandung suatu penilaian yang serta merta baik dan buruk. Pluralisme bisa menjadi potensi yang memacu persaingan yang sehat untuk memperoleh kemajuan, tetapi sebaliknya pluralisme bisa beralih menjadi potensi yang

mengobarkan pertentangan yang paling menghancurkan, terlebih jika pertentangan itu terjadi dalam persoalan keyakinan agama.

Gagasan di atas hendak mengatakan kepada kita bahwa pluralitas menjadi ruang untuk membangun keharmonisan antaragama jika pluralisme dipahami sebagai wadah perjumpaan antaragama. Tetapi sebaliknya, pluralisme bisa menjadi arena perpecahan, bila pluralisme dimengerti sebagai ruang yang mengabsolutkan kebenaran agama tertentu. Oleh karena itu, perjuangan untuk membangun dialog antaragama di Indonesia kiranya membutuhkan suatu paradigma baru yang sungguh bersentuhan langsung dengan perkara sosial hidup manusia. Artinya, sebuah paradigma yang memungkinkan terjadinya hubungan yang lebih dialogis dan konstruktif untuk menunjang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam hal ini, setiap agama dipanggil untuk mengupayakan keharmonisan antaragama sekaligus menciptakan perdamaian dan keadilan. Perjuangan bagi tegaknya keadilan serta perdamaian merupakan bagian tak terpisahkan dari panggilan dan tugas perutusan agama. Karena itu, sudah sewajarnya agama-agama memperjuangkannya, serta terus menerus memromosikannya. Oleh karena itu, agama-agama perlu belajar dan mengakui pengalaman sejarah, bahwa pertikaian serta klaim kebenaran yang sempit dalam diri penganut agama, malahan menjadikan wajah kebenaran yang diusung, pun wajah Tuhan yang diimaninya, tercemar (Krispurwana Cahyadi, 2007:96).

5. Simpulan

Setelah melihat beberapa pandangan, paradigma dan peran Gereja Katolik Indonesia dalam membangun dialog antaragama, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah simpulan apakah yang dapat ditarik dari rangkaian pergumulan teologis ini? Kami ingin mengemukakan dua tema berikut ini.

Pertama, Konsili Vatikan II menyadari bahwa sikap eksklusif sejak pernyataan tentang “*extra ecclesiam nulla salus*” menempatkan Gereja Katolik dalam sebuah sejarah yang kelam. Oleh karena itu, Konsili membuka jendela dialog dengan menerbitkan *Nostra Aetate*, yakni Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristen (28 Oktober 1965). Yang jelas, kita melihat bahwa melalui Ensiklik *Ecclesiam suam* (1964) dan Surat Apostolik *Evangelii Nuntiandi* (1975) dari Paus Paulus VI dan Ensiklik *Redemptoris Missio* (1990) dari Paus Yohanes Paulus II, Gereja membuka diri untuk berdialog dengan agama-agama lain, sekaligus menghapus luka-luka lama, akibat sikap eksklusif dan egoisme sebelumnya.

Kedua, sikap dialogal Gereja Katolik yang dikembangkan sejak Konsili Vatikan II itu telah diteruskan dengan penuh daya oleh Gereja Katolik Indone-

sia. Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam menggaungkan dialog antaragama menunjukkan bahwa Gereja sungguh-sungguh ingin menjadi saksi-saksi hidup di tengah tiadanya harapan akan masa depan yang cerah akibat konflik dan kekerasan yang telah mencabik-cabik tata nilai hidup bersama. Oleh karena itu, Gereja Katolik Indonesia terus-menerus mengerjakan panggilan misionernya untuk mencari pemahaman dan pengertian yang baik dan benar tentang para penganut iman lain, sehingga dengannya kekerasan atas nama agama dapat dihindari dan ditiadakan. Sebaliknya, meniadakan dialog berarti meniadakan usaha manusia untuk saling memahami, yang berarti membiarkan konflik dan/atau kekerasan itu tetap menghiasi hidup masyarakat Indonesia ini.

Kita harus mengakui dan menerima bahwa kemajemukan agama merupakan realitas sosial yang tidak bisa dipisahkan rajutan masyarakat Indonesia. Kita telah mencatat bahwa kemajemukan ini sudah sering menimbulkan berbagai persoalan laten (konflik-konflik horizontal: ketegangan, kecurigaan, sikap sektarian, bahkan kekerasan fisik) seperti dicatat di atas. Itulah akibat dari kematian hidup dialogis. Agama, yang seharusnya menjadi pemersatu dan rahmat bagi manusia, ternyata menjadi sumber pemecah antar kelompok-kelompok yang hanya membenarkan dirinya sendiri. Semua tindakan itu bagaikan mengembalikan manusia kepada taraf “tribalisme primitif” (Ramberth, 2008:6), dengan sikap utama “suku-ku melawan suku-mu, dan Tuhan-ku melawan Tuhan-mu”.

Menanggapi keragaman agama yang telah melahirkan berbagai macam konflik dan kekerasan itu, saya melihat bahwa dialog merupakan satu-satunya terobosan misioner yang tepat untuk memajukan perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat. Kita semua yakin bahwa tidak ada jalan lain untuk saling memahami satu sama lain dan menjembatani perbedaan-perbedaan itu kecuali lewat dialog. Dialog bukan hanya sekedar wacana dan perjumpaan yang dangkal melainkan keterlibatan yang intens dan menyentuh akar-akar eksistensi manusia. Hanya dengan keterbukaan dan pemahaman yang positif, konstruktif, dan integral mengenai agama-agama lain dapatlah ditumbuhkan kerjasama yang baik (Armada Riyanto, 2010:396). Misi dialogal antaragama ini merupakan peziarahan panjang Gereja Katolik Indonesia, suatu irama hidup yang tidak lain daripada evangelisasi berlanjut, suatu evangelisasi yang tidak pernah final (Sudhiarsa, 2009:103-118).

DAFTAR PUSTAKA

Beding, Marcel (1986), *25 Tahun Hirarki Gereja Katolik Indonesia 1961-1986*, Jakarta: Komisi Komunikasi Sosial MAWI.

- Binawan, Al. Andang L. (2007), "Dialog Antaragama dan Tantangan bagi Perdamaian serta Keadilan", dalam *Diskursus*, 6/1 [April 2007]: 85-101.
- Binawan, Al. Andang L. (2007), "Peran Gereja dalam Gerakan Sosial: Sebuah Catatan sesuai SAGKI 2005", dalam *Spektrum* 4/XXXV [2007]:64-76.
- Binawan, Al. Andang L. (2010), *Ensiklik Deus Caritas Est dan Komentar: Gereja dan Pelayanan Kasih*, Yogyakarta: Kanisius.
- Coward, Harold (1989), *Pluralisme: Tantangan Bagi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardawiryana) (1993), Jakarta: Obor.
- Fajar, H.A. Malik, "Indonesia Baru dalam Perspektif Pluralisme Agama", dalam *Spektrum* 1/XXIX [2001]: 45-51.
- Howard, Harold (1989), *Pluralisme: Tantangan bagi agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga (2003), Jakarta: Balai Pustaka.
- Kirchberger, Georg ed. (2002), *Dialog dan Pewartaan*, Maumere: LPBAJ.
- Knitter, Paul F. (2005), *Menggugat Arogansi Kekristenan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Krispurwana Cahyadi, T. (2007), *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi dan Kehidupan*, Jakarta: Obor.
- Mulkhan, Abdul Munir (2007), *Satu Tuhan Seribu Tafsir*, Yogyakarta: Kanisius.
- Panikkar, Raimundo (1994), *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rausch, Thomas P. (2001), *Katolisisme: Teologi Bagi Kaum Awam*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rembeth, Victor (2008), "Pancasila dan Kekerasan Agama", dalam Opini Kompas, *Kompas* 3 Juni, hlm. 6.
- Riyanto, Armada CM (1995), *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Armada CM ed. (2000a), *Agama-Kekerasan: Membongkar Eksklusivisme*, Malang: Dioma dan STFT Widya Sasana Malang.
- Riyanto, Armada CM ed. (2000b), *Agama Anti Kekerasan: Membangun Iman yang Merangkul*, Malang: Dioma dan STFT Widya Sasana Malang.
- Riyanto, Armada CM (2007), "Nota Meretas Jalan "Societas Dialogal" Pembacaan Etis-Filosofis Nota Pastoral KWI", dalam *Spektrum* 4/XXXV

(2007): 11-42.

Riyanto, Armada CM (2010), *Dialog Interreligius: Historis, Tesis, Pergumulan Wajah*, Yogyakarta: Kanisius.

Spektrum No. 1, Tahun XXIX, 2001.

Spektrum No. 1, Tahun XXVII, 1999.

Spektrum No. 4, Tahun XXVI, 1998.

Sudhiarsa, Raymundus (2008), "Membangun Masyarakat Multikultural dalam Terang Iman", dalam Raymundus Sudhiarsa (ed), *Kearifan Sosial Lintas Budaya: SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja*, Yogyakarta: Lamalera.

Sudhiarsa, Raymundus (2009), *Evangelisasi Berlanjut: Meneruskan Wasiat Guru*, Yogyakarta: Kanisius.

Yohanes Paulus II (1992), *Ensiklik Redemptoris Missio* (terj. Marcel Beding), Ende: Nusa Indah.

